

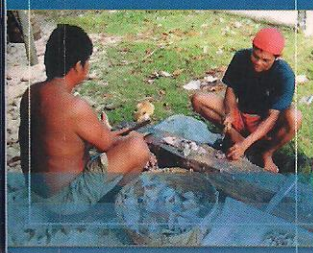
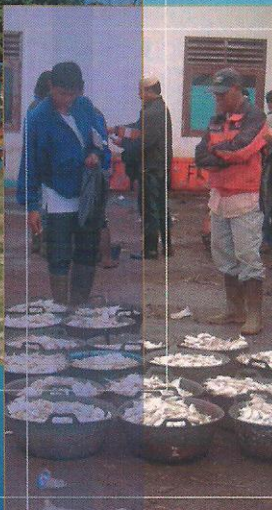


Studi Penerapan

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

pada Masyarakat
Pulau Kecil
di Pulau Sebatik:
Persepsi, Sikap
Aspirasi Masyarakat

editor:
Masyhuri Imron





Studi Penerapan

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

Pengelolaan perairan di Pulau Sebatik lebih banyak bertumpu pada kebijakan pemerintah, dan kurang melibatkan masyarakat. Akibatnya, manfaat kebijakan itu kurang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, banyak kebijakan yang penerapannya di lapangan dirasakan masih kurang efektif, dan kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurang sosialisasi. Salah satu kebijakan pengelolaan perairan pesisir adalah yang disebut Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Kebijakan yang merupakan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tersebut sampai saat ini belum diketahui oleh masyarakat, karena belum pernah ada sosialisasi. Memang undang-undang tersebut belum diterapkan, namun penerapannya diperkirakan bisa merugikan masyarakat, sehingga masyarakat cenderung menolaknya, terutama jika HP3 itu diserahkan kepada perorangan atau badan hukum. Meskipun demikian, masyarakat akan menerimanya jika pengelolaan itu diserahkan kepada masyarakat lokal yang selama ini telah memanfaatkan kawasan perairan tersebut.

ISBN: 978-979-799-578-2



LIPI Press

Studi Penerapan

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik:
Persepsi, Sikap dan Aspirasi Masyarakat

Oleh :
Masyhuri Imron
Ary Wahyono
A. Solihin



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

© 2010 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik: Persepsi, Sikap dan Aspirasi Masyarakat/Masyhuri Imron, Ary Wahyono, A. Solihin – Jakarta: LIPI Press, 2010.

x hlm + 149 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-578-2

1. HP3 - Sebatik

363. 6

Penerbit: **LIPI Press, Anggota Ikapi**



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sekitar 17.508. Fakta geografis menunjukkan bahwa sebagian besar di antara pulau-pulau itu merupakan pulau-pulau kecil, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 pulau. Di antara pulau-pulau kecil tersebut, sebagian berada di wilayah perbatasan, yaitu sebanyak 92 pulau.

Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan itu memiliki fungsi strategis bagi negara Indonesia, karena berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga, yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Karena fungsinya yang strategis, maka untuk menjaga keutuhan wilayah negara, pulau-pulau kecil di perbatasan itu perlu dikelola secara khusus dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian “Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik: Persepsi, Sikap dan Aspirasi Masyarakat” merupakan salah satu dari kegiatan penelitian yang termasuk dalam program kompetitif, khususnya yang berada di bawah sub program Ketahanan dan Daya Saing Wilayah dan Masyarakat Pesisir. Penelitian yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI ini merupakan upaya mencari alternatif pengelolaan lingkungan perairan laut di pulau kecil, khususnya di kawasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan penelitian ini dapat terselenggara atas kerjasama dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Untuk itu kami mengucapkan terima terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus ucapan terima kasih juga

sampaikan kepada masyarakat di lokasi penelitian, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan syukur juga sudah selayaknya kami panjatkan ke hadapan Allah, atas selesainya penelitian ini.

Walaupun penelitian ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kekurangan mungkin masih terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2010

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rahman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengelolaan Kelautan di Indonesia	1
1.2 Perspektif Teoritik Pengelolaan Kelautan	12
BAB II DINAMIKA MASYARAKAT NELAYAN.....	23
2.1 Penduduk Sebatik	23
2.2 Ketergantungan Penduduk Sebatik pada Laut	31
2.3 Sejarah Kenelayanan di Sebatik	35
2.4 Permasalahan Kenelayanan di Sebatik	35
2.4.1 Pemasaran	36
2.4.2 Permodalan	37
2.4.3 <i>Illegal Fishing</i>	38
2.4.4 Perizinan Ganda	40
2.4.5 Konflik Nelayan	40
2.4.6 Perampokan	46
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM	
PENGELOLAAN LAUT	47
3.1 Perizinan	47
3.2 <i>Illegal Fishing</i>	52
3.3 Konservasi Laut	55
3.4 Budi Daya Laut	65
3.5 Baganisasi	71
3.6 <i>Mini Trawl</i>	72
3.7 Pengamanan Laut	78

BAB IV PERSEPSI, SIKAP DAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAUT	85
4.1 Perizinan	85
4.2 <i>Illegal Fishing</i>	88
4.3 Konservasi Laut	95
4.4 Budi Daya Laut	101
4.5 Baganisasi	104
4.6 Mini <i>Trawl</i>	107
4.7 Pengamanan Laut	111
4.8 KKLD 114	
BAB V PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP3) DI SEBATIK	117
5.1 Pengetahuan Masyarakat tentang HP3	117
5.2 Persepsi, Sikap dan Harapan Masyarakat Terhadap HP3....	120
5.3 Permasalahan dalam Penerapan HP3	123
5.3.1 Permasalahan Sosial.....	123
5.3.2 Permasalahan Hukum	128
BAB VI KESIMPULAN	139
DAFTAR PUSTAKA	147